



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tim Penulis:

Hartoto, Itat Tatmimah, Endraria, Muzayyanah, Sriyani, Mohamad Djasuli,
Iroh Rahmawati, Heni Dwi Lestari, Mertyani Sari Dewi, Kurniasih Setyagustina,
Mela Nurdialy, Sri Adella Fitri, Oryza Ardhiarisca.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tim Penulis:

Hartoto, Itat Tatmimah, Endraria, Muzayyanah, Sriyani, Mohamad Djasuli,
Iroh Rahmawati, Heni Dwi Lestari, Mertyani Sari Dewi, Kurniasih Setyagustina,
Mela Nurdialy, Sri Adella Fitri, Oryza Ardhiarisca.



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tim Penulis:

**Hartoto, Itat Tatmimah, Endraria, Muzayyanah, Sriyani, Mohamad Djasuli,
Iroh Rahmawati, Heni Dwi Lestari, Mertayani Sari Dewi, Kurniasih Setyagustina,
Mela Nurdialy, Sri Adella Fitri, Oryza Ardhiarisca.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-538-3

Cetakan Pertama:

Juni, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Akuntansi Sektor Publik.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Di era globalisasi, peran Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dinilai sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dalam proses perkembangannya akuntansi sektor publik mengalami perubahan. Karena sebelum adanya reformasi dan transparansi akuntansi sektor publik dianggap sebagai tempat kebocoran dana, akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta). Setelah era reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya "*good public and corporate governance*", karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi entitas yang dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan publik. Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik nonprofit motif, dimiliki secara kolektif, dan pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan tidak harus menerima imbalan langsung. Sedangkan akuntansi sektor bisnis memiliki karakteristik profit motif, dimiliki secara perorangan atau badan, dan pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan menerima imbalan langsung baik barang maupun jasa.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "tiada gading yang tidak retak" dan sejatinya kesempurnaan

hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juni, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 LINGKUP DAN JENIS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	1
A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	2
B. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik Dengan Sektor Bisnis.....	3
C. Perbedaan Sektor Publik Dengan Sektor Bisnis Dalam Menerapkan Sistem Akuntansi.....	5
D. Akuntansi Pemerintahan	8
E. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).....	11
F. Rangkuman Materi	12
BAB 2 KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK.....	19
A. Pendahuluan.....	20
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	20
C. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	22
D. <i>Value For Money</i>	24
E. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	27
F. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	32
G. Jenis Akuntansi Sektor Publik	34
H. Karakteristik <i>Good Governance</i> Menurut UNDP (<i>United National Development Program</i>).....	34
I. Akuntabilitas Publik	36
J. Rangkuman Materi	37
BAB 3 REGULASI KEUANGAN PUBLIK	41
A. Pendahuluan.....	42
B. Prinsip-Prinsip Regulasi Keuangan Publik.....	43
C. Kategori Regulasi	46
D. Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Penilaian dan Pembinaan Keuangan	47
E. Investasi Pasar Modal.....	48
F. Pengungkapan dan Pemantauan.....	49
G. Penggunaan Teknologi Keuangan	50
H. Penagihan, Pembayaran, dan Pembelian.....	51

I. Penyelesaian dan Penyelidikan Kepailitan	52
J. Perlindungan Konsumen	54
K. Penerapan Regulasi Keuangan	55
L. Pelaporan dan Pemantauan Regulasi	56
M. Penyelesaian dan Penyelidikan Regulasi	58
N. Rangkuman Materi	58
BAB 4 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	63
A. Pendahuluan	64
B. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	65
C. Rangkuman Materi	74
BAB 5 STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	77
A. Pendahuluan	78
B. Gambaran Umum Standar Akuntansi	78
C. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah	79
D. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan	82
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	88
F. Kebijakan Akuntansi Beban LO dan Belanja LRA	89
G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	90
H. Kebijakan Akuntansi Aset	91
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	94
J. Kebijakan Akuntansi Perubahan Kebijakan, Koreksi Kesalahan, dan Peristiwa Luar Biasa	95
K. Rangkuman Materi	96
BAB 6 PERENCANAAN PUBLIK	99
A. Pengantar	100
B. Hakikat dan Konsep Dasar Perencanaan	101
C. Arti Penting Perencanaan Publik (Pembangunan)	106
D. Proses Perencanaan Publik: Dalam Pembangunan Daerah	107
E. Corak Perencanaan	110
F. Susunan Dokumen: Integrasi Perencanaan	111
G. Dasar Hukum dan Konsep Perpaduan Perencanaan dan Penganggaran	117
H. Pentingnya Perpaduan Perencanaan dan Penganggaran	118
I. Evaluasi Perpaduan: Perencanaan dan Penganggaran	120
J. Solusi Alternatif Perpaduan Perencanaan dan Penganggaran	121

K. Rangkuman Materi	122
BAB 7 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK	127
A. Pendahuluan.....	128
B. Penganggaran Sektor Publik	129
C. Karakteristik Anggaran Publik.....	131
D. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik	131
E. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik.....	132
F. Siklus Penganggaran Publik	133
G. Metode Penyusunan Anggaran	134
H. Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik.....	135
I. Pentingnya Anggaran Sektor Publik	138
J. Teknik Penganggaran Publik.....	138
K. Implementasi Penganggaran di Organisasi Sektor Publik	139
L. Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan Berkembang	141
M. Rangkuman Materi	143
BAB 8 REALISASI ANGGARAN PUBLIK	147
A. Pendahuluan.....	148
B. Teori Realisasi Anggaran Publik.....	149
C. Sistem Realisasi Anggaran Publik	150
D. Siklus Realisasi Anggaran Publik	151
E. Teknik Realisasi Anggaran Publik.....	153
F. Laporan Realisasi Anggaran	158
G. Rangkuman Materi	160
BAB 9 PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK	165
A. Pendahuluan.....	166
B. Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	166
C. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	167
D. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	167
E. Skala Pengukuran Kinerja Sektor Publik	168
F. Siklus Pengukuran Kinerja Sektor Publik	169
G. Informasi Yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	170
H. Peranan Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	174

I.	Indikator Kinerja dan Pengukuran <i>Value for Money</i>	176
J.	Pengukuran <i>Value for Money</i>	178
K.	Pengembangan Indikator <i>Value for Money</i>	178
L.	Langkah-Langkah Pengukuran <i>Value for Money</i>	179
M.	Contoh Indikator Kinerja di Perguruan Tinggi	181
N.	Rangkuman Materi	182
BAB 10	PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK	185
A.	Pendahuluan	186
B.	Pembahasan Materi	186
C.	Rangkuman Materi	204
BAB 11	TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENURUT ISAK 35	207
A.	Pendahuluan	208
B.	Akuntansi Sektor Publik	209
C.	Standar Akuntansi Sektor Publik	210
D.	Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	210
E.	Siklus Akuntansi	214
F.	Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik	216
G.	Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik	219
H.	Rangkuman Materi	236
BAB 12	PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	241
A.	Pendahuluan	242
B.	Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik	242
C.	Peraturan Pemerintah Tentang Laporan Keuangan Sektor Publik	243
D.	Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	244
E.	Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik & Swasta	246
F.	Persamaan Laporan Keuangan Sektor Publik & Swasta	247
G.	Komponen-Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik	247
H.	Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik	248
I.	Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan	249
J.	Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik	250
K.	Rangkuman Materi	272

BAB 13 VALUE FOR MONEY AUDIT	275
A. Pendahuluan.....	276
B. Karakteristik <i>Value for Money</i>	277
C. <i>Operational Audit</i>	279
D. Program Audit	281
E. Standar <i>Auditing</i> Sektor Publik.....	284
F. Audit Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah	284
G. Rangkuman Materi	285
GLOSARIUM	288
PROFIL PENULIS	296



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 1: LINGKUP DAN JENIS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Ir. Hartoto, M.Si.

STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

BAB 1

LINGKUP DAN JENIS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Menurut Meliana, dkk (2007), akuntansi sektor publik merupakan gabungan kata akuntansi dengan sektor publik. Akuntansi merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan bagi entitas untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Hartoto, dkk (2021), sektor publik merupakan entitas yang dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan bagi entitas untuk pengambilan keputusan yang dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan publik.

Renyowijoyo (2008), akuntansi sektor publik merupakan praktik akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga publik, seperti lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah, organisasi publik non pemerintah, dan organisasi publik lainnya. Dengan demikian, akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik adalah factor ekonomi, politik, kultural, dan demografi.

Menurut Hartoto (2022) dalam manajemen keuangan sektor publik merupakan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam entitas sektor publik. Sedangkan Akuntansi manajemen sektor publik merupakan prinsip-prinsip akuntansi dan juga prinsip manajemen yang diterapkan dalam entitas sektor publik. Sehingga akuntansi sektor publik merupakan

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Hasiholan Pulungan, Ahmad Basid Hasibuan, dan Luciana Haryono. 2013. Akuntansi Keuangan Dasar, Berbasis PSAK Per Juni 2012. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Bahrullah Akbar. 2013. Akuntansi Pemerintahan. PT. Bumi Metro Raya, Jakarta.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hadri Mulya. 2013. Memahami Akuntansi Dasar, Pendekatan teknis Siklus Akuntansi. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hartoto, 2021. Akuntansi Syariah, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. Penerbit Widina. Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 01 Penyajian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 03 Laporan Arus Kas. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 05 Akuntansi Persediaan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 06 Akuntansi Investasi. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 07 Akuntansi Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengejaan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 09 Akuntansi Kewajiban. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 10 Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Luar Biasa. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 11 Laporan Keuangan Konsolidasian. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 12 Laporan Operasional. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 14 Akuntansi Aset Takberwujud. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 01 Penyajian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 03 Laporan Keuangan Interim. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 04 Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 05 Laporan Keuangan Tersendiri. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 19 Aset Takberwujud. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Muindro Renyowijoyo. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nonlaba. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Nanu Hasanuh. 2011. Akuntansi Dasar, Teori dan Praktek. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

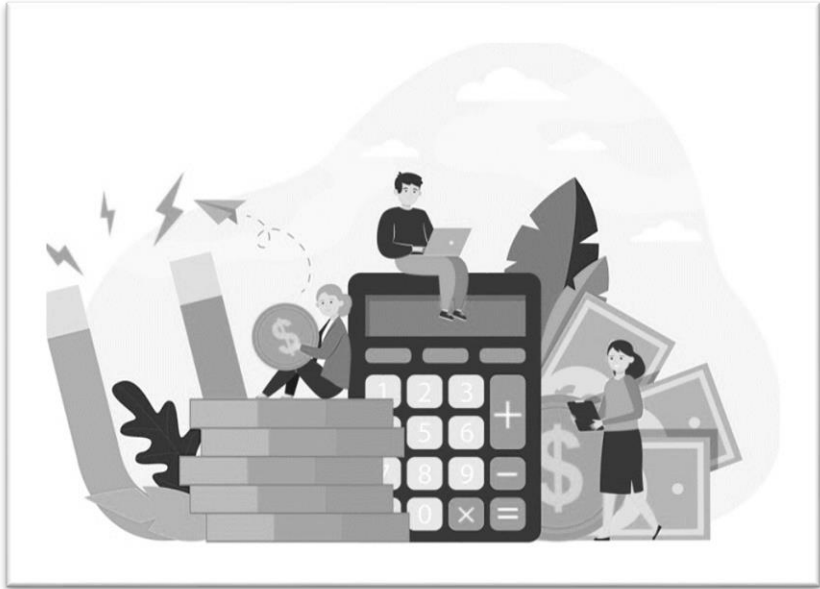
Tulis S. Meliala, Niko Silitonga dan Timbul Sinaga. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Semesta Media, Jakarta.

<https://akuntansikeuangan.com/cash-basis-vs-accrual-basis> 2021, jam: 08.32.

<http://www.integrasi-edukasi.org/sistem-informasi-akuntansi-berbasis-kas-vs-basis-akrual>

<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/789-memahami-cash-basis-vs-accrual-basis>

<https://www.finansialku.com/definisi-akrual/>



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 2: KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

Itat Tatmimah, S.E., M.Si.

Universitas Muhammadiyah Cirebon

BAB 2

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, peran Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dinilai sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dalam proses perkembangannya akuntansi sektor publik mengalami perubahan. Karna sebelum adanya reformasi dan transparansi akuntansi sektor publik dianggap sebagai tempat kebocoran dana, akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta). Setelah era reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya "*good public and corporate governance*", karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya. Pada lingkup pembahasan ini meliputi, terdapat tiga pokok bahasan yang vital, yaitu meliputi: (1) *Public Sector Accounting Management*, (2) *Public Sector Financial Accounting* dan (3) *Public Sector Audit*.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik yang merupakan aktivitas Profesi akuntansi yang terspesialisasi, tetapi untuk saat ini akuntansi sektor publik sedang proses menjadi bagian dari disiplin ilmu substansial yang lebih dibutuhkan. Begitu pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik, seperti praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN maupun swasta dan lembaga sektor pemerintah hingga organisasi publik lainnya, begitupun terdapat permintaan dari masyarakat untuk dilakukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas publik dalam sektor publik.

Akuntansi sektor publik yaitu merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi, mengikhtisar serta dapat menyajikan kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Tekanan yang dialami organisasi sektor publik untuk dapat lebih

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi., Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Badjuri, Achmad, dan Trihapsari, Elisa. 2004. Audit Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah”, Fokus Ekonomi.
- Bastian Indra dan Gatot S. 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik- Konsep untuk Pemerintah Daerah, Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
- Chariri, Anis, dan Ghozali, Imam.2000. Teori Akuntansi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Darsono, dan Ashari. 2004. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Yogyakarta
- Halim Abdul, et.al.2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap Sofyan Syafri.2006. Analitis Kritis atas Laporan Keuangan, Raja Grafindo, Jakarta
- Heribertus Andre Purwanugraha, SE., M.B.A. “Akuntansi Sektor Publik” Edisi Ketiga
- Mahmudi. 2005. Penilaian Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: STIE YKPN
Moh. Mahsun, S E., M.Si., Ak.,CA,CPA, Firman Sulistyowati, S E .,
M.Si., QIA ,
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik, ANDI Yogyakarta



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 3: REGULASI KEUANGAN PUBLIK

Dr. Endraria, S.E., M.M., M.Akt., CRA., CRP.

Universitas Muhammadiyah Tangerang

BAB 3

REGULASI KEUANGAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Regulasi keuangan publik adalah sistem yang diterapkan oleh otoritas pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, perusahaan, dan pasar keuangan. Regulasi keuangan publik dapat meliputi berbagai aspek, termasuk penyaluran pinjaman kepada pemerintah, pengaturan komisi broker, pengawasan transaksi keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan utama regulasi keuangan publik adalah untuk melindungi para investor dan nasabah dari tindak kecurangan atau penipuan keuangan. Ini juga membantu untuk memastikan bahwa pasar keuangan beroperasi dengan cara yang adil dan transparan. Regulasi keuangan publik juga menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh institusi keuangan dan perusahaan. Dengan demikian, regulasi keuangan publik memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Regulasi keuangan publik merupakan seperangkat aturan yang diterapkan oleh otoritas pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pasar keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan keselamatan pasar keuangan yang pada akhirnya akan membantu investor dan nasabah melindungi kepentingan mereka. Regulasi ini mencakup pengawasan, pengendalian, dan pembatasan aktivitas di pasar keuangan.

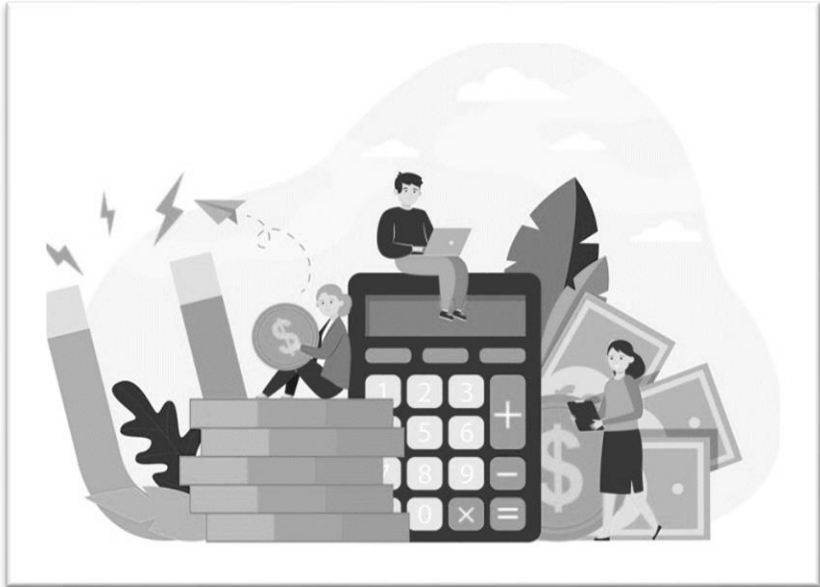
Regulasi keuangan publik meliputi berbagai aspek, termasuk:

1. Penerapan standar akuntansi: Standar akuntansi diperlukan untuk menetapkan cara yang tepat untuk mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan yang akurat dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboelazm, K. S. (2018). *Reforming public procurement and public financial management in Africa: Dynamics and influences*. *Journal of Advances in Management Research*, (ahead-of-print).
- Alfath, M. H. (2019). *Keuangan Negara Dan Keuangan Publik*. *Skripsi. Program Sarjana (S1) Universitas Sriwijaya*. Malang.
- Alkaraan, F. (2018). *Public financial management reform: an ongoing journey towards good governance*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16 (4), 585–609.
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Penerbit Andi.
- Carratù, M., Chiarini, B., D'Agostino, A., Marzano, E., & Regoli, A. (2019). *Air pollution and public finance: Evidence for European countries*. *Journal of Economic Studies*.
- Darmawati, A. (2020). *Pengelolaan Bumn Sebagai Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Privat Dalam Persepektif Hukum Keuangan Negara*. *Yustitia*, 6(2), 119–134.
- Giosi, A., Testarmata, S., Brunelli, S., & Staglianò, B. (2014). *The dimensions of fiscal governance as the cornerstone of public finance sustainability: a general framework*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Gunawan, D. R. (2016). *Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya)*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102.
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.
- Indah, D. R., Abdullah, S., Junita, A., & Fahlevi, H. (2017). *Kajian kepatuhan Pemerintah Daerah atas Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh (Studi kasus pada Dinas Kesehatan)*. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6(1), 627–637.
- Indrawati, Y. (2015). *Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 197–211.

- Işık, A. K., & Koç, E. S. (2021). *Some Evaluations of the Effectiveness of Public Sector Accounting System in Turkey*. In *Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing* (Vol. 105, pp. 1–15). Emerald Publishing Limited.
- Manurung, E. T., & Hermawan, Y. P. (2013). *Reformasi Regulasi Keuangan*.
- Monda, B., & Giorgino, M. (2014). *The need for research in innovation in public finance*. *Managerial Finance*, 40(11).
- Nakyeyune, G. K., Tauringana, V., Ntayi, J. M., & Nkundabanyanga, S. K. (2016). *Public finance regulatory compliance among public secondary schools*. *International Journal of Social Economics*.
- Nayyar, D. (2008). *Macroeconomics of structural adjustment and public finances in developing countries: A heterodox perspective*. *International Journal of Development Issues*.
- Nkundabanyanga, S. K., Nakyeyune, G. K., & Muhwezi, M. (2019). *Management mechanisms, deterrence measures and public finance regulatory compliance in Uganda*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Schneiberg, M., & Bartley, T. (2010). *Regulating or redesigning finance? Market architectures, normal accidents, and dilemmas of regulatory reform*. In *Markets on trial: The economic sociology of the US financial crisis: Part A*. Emerald Group Publishing Limited.
- Siti, K., & Utia, M. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Yapa, P. W. S., & Ukwatte, S. (2015). *The new public financial management (NPFM) and accrual accounting in Sri Lanka*. In *The Public Sector Accounting, Accountability and Auditing in Emerging Economies*. Emerald Group Publishing Limited.



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 4: KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Muzayyanah, M.Pd.

Universitas Muhammadiyah Cirebon

BAB 4

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti, salah satunya ditandai dengan lahirnya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penerapan akuntansi sektor publik khusus di pemerintahan. Akuntansi sektor publik adalah suatu alat informasi untuk pemerintahan sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyedia informasi pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Mekanisme pada akuntansi sektor publik meliputi teknik dan analisis yang diterapkan di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya pemerintah daerah misalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), LSM dan yayasan social lainnya. Kerangka konseptual pada akuntansi sektor publik yaitu konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik bagi pihak eksternal dan kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Untuk memahami suatu konsep publik, isu sentral, peran dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dalam membantu terciptanya proses pertanggungjawaban publik sebab menurut Halim & Kusufi (2017) mengatakan bahwa untuk memudahkan dalam memahami atau setidaknya mengenal akuntansi sektor publik, maka akuntansi sebaiknya dilihat sebagai sebuah proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, Sarwendah. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2017. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Salmuddin, dan Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Novianty Lariska. 2016. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik. Diakses 11 Februari 2023.
- Rahma, Umi Hani. 2021. Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Media Sains Indonesia.



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 5: STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Sriyani, S.E., M.Akt.

Politeknik Keuangan Negara STAN

BAB 5

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Perhatian masyarakat terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik semakin besar. Lembaga publik dituntut oleh masyarakat untuk mengelola keuangan negara/daerah secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tuntutan masyarakat tersebut lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan keuangan negara/daerah yang dikelolanya. Akuntansi sektor publik merupakan sebuah sistem akuntansi yang digunakan di lembaga-lembaga publik baik lembaga pemerintah maupun lembaga publik non-pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik ataupun masyarakat atas kinerjanya. Pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun oleh pemerintah, untuk menjaga obyektifitas nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan perlu disiapkan standar akuntansi yang digunakan oleh seluruh entitas pelaporan/ entitas akuntansi di sektor publik baik di di pusat maupun di daerah.

Dengan adanya standar ini laporan keuangan sektor publik diharapkan menyajikan nilai yang sesuai dan dapat diperbandingkan dengan entitas publik lainnya.

B. GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI

Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintah yang berlaku baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>.
- Undang-Undang RI. 2004. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara." 2004(May): 352. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 6: PERENCANAAN PUBLIK

Dr. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA., CRA., CTT., CPTT.

Universitas Trunojoyo Madura

BAB 6

PERENCANAAN PUBLIK

A. PENGANTAR

Istilah "perencanaan publik" sebenarnya lebih dikenal dengan perencanaan pembangunan sektor publik, sehingga penulis memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan publik dalam pembahasan bab ini sama dengan "perencanaan pembangunan di sektor publik". Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Begitupun bagi suatu negara atau daerah di dalam proses pembangunan membutuhkan suatu perencanaan yang sering dikenal dengan istilah "perencanaan pembangunan". Perencanaan publik (pembangunan) merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Tujuan dari perencanaan publik adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Di Indonesia perencanaan publik pembangunan, baik nasional maupun daerah diatur dalam beberapa produk perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal dengan UU SPPN,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Lewis, Mulford. (1965). *Websters World University Dictionary*. Washington DC: Publishers Company inc.
- Djasuli, Mohamad. (2013). *Perencanaan, Penyusunan Perda dan Penganggaran APBD*. Madura: UTM Press.
- Djunaidi, Achmad. (2012). *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- George R. Terry. (2000). *Principles of Management*. edisi bahasa Indonesia. Prinsip-Prinsip Manajemen. Bandung: Bumi Aksara.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jhingan, ML. (1988). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Lembaga Administrasi Negara. (1985). *Manajemen dalam Pemerintahan*. Jakarta: LAN.
- Mahi, Ali Kabul. dan Trigunarso, Sri Indra. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan aplikasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA Group.
- Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Patarai, Muhammad Idris. (2016). *Perencanaan Pembangunan Saerah (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.
- Rahajeng, Anggi. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan dan Baso, Nasar. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. (2009). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Riyadi dan Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2002). *Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Sjafrizal. (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Baduose Media.

Sirojuzilam dan Mahalli, K. (2010). *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press.

Peraturan-Peraturan terkait:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 7: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Iroh Rahmawati, S.E., M.Ak.

Universitas Sutomo

BAB 7

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, membawa dampak kepada kegiatan pemerintahan atau sektor publik dan organisasi non-laba yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin kompleks, informasi memegang peranan semakin penting. Informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial. Anggaran merupakan alat perencanaan kegiatan publik yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Anggaran merupakan alat ekonomi sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin keberlangsungan, dan meningkatkan kualitas hidup organisasi. Penganggaran sektor publik berkaitan erat dengan proses penentuan alokasi dana setiap kegiatan atau program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai pada saat perumusan strategi dan perencanaan telah dilakukan. Buku ini akan membahas mengenai akuntansi sector publik yang akan dibagi menjadi delapan bagian, yang terdiri atas:

- a. Penganggaran Sektor Publik
- b. Karakteristik Anggaran Publik
- c. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
- d. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
- e. Siklus Penganggaran Publik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Haryanto, dkk. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2010, *Public Sector Accounting 6* Edition. Prentice Hall Pearson Publishing (JM)
- Majid. Jamaluddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Mohamad Mahsun, Firma Sulistiyani and Heribertus Andre P., (2006), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF.
- Netra, W., & Damayanthi, E. (2017). Pengaruh Karakter Personal, Reputasi, Dan Self Esteem Terhadap Senjangan Anggaran. E-Jurnal Akuntansi, 19(2), 1406–1435.
- V. Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Mona (ed). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 8: REALISASI ANGGARAN PUBLIK

Heni Dwi Lestari, S.Pd., M.Par.

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 8

REALISASI ANGGARAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Dengan terdapatnya penerapan pengelolaan keuangan daerah mampu menaikkan pertumbuhan Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik sudah digunakan oleh lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD serta organisasi publik yang lainnya. Akuntansi Sektor Publik merupakan sesuatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) serta organisasi ataupun entitas publik yang digunakan dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak- pihak yang membutuhkan (Jamaluddin, 2019). Pemerintah yang bersih diharapkan mampu memberikan data dan informasi secara transparan serta akuntabel dalam mengelola keuangan. Jadi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berbentuk laporan pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi sektor publik (Laila& Handayani, 2019).

Organisasi sektor publik wajib mencermati *value for money* dalam melaksanakan sesuatu aktivitas (Jamaluddin, 2019). *Value for money* sendiri dapat dimaksud dengan pengukuran kinerja sektor publik yang membagikan data tentang sesuatu anggaran yang sudah dibelanjakan telah menciptakan suatu nilai ataupun tidak untuk masyarakat. Pengukuran yang diartikan meliputi ekonomi, efisien, serta efektif. Dengan *value for money* organisasi sektor publik dapat ditingkatkan daya guna serta kualitas pelayanan publik, serta alokasi belanja dapat lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

Tingkatan keberhasilan penganggaran dapat ditunjukkan dengan terdapatnya penyeimbang antara pemasukan serta belanja apabila terdapat defisit serta surplus anggaran, berarti penerapan tersebut dinyatakan tidak berhasil. Dari perihal tersebut hingga terbentuklah pemikiran jika penyerapan anggaran serta realisasi pemasukan wajib

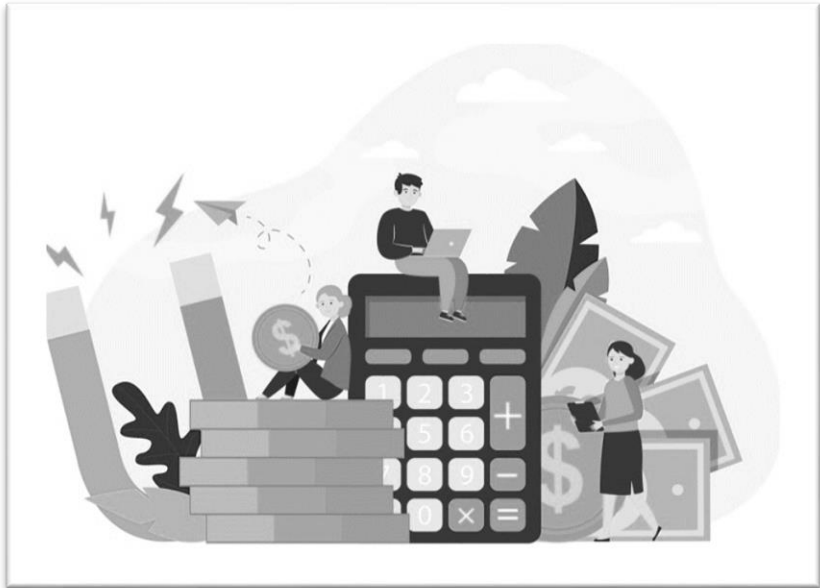
DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. 2008. Manajemen Pemasaran dan Marketing. Bandung: Alfabeta.
- Basri, Ramlah. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202-212.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Detri, Ifa. 2014 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Sinaga, Edward James. 2016. Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Jamaluddin, M. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Laila, A., Noor, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8 (7), 1–15.
- Makka, Harry Al dkk. 2015. Jurnal Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Marlena., Retno Murnisari & Nikita Larasati Purbaningrum. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. *Journal of Accounting and Tax*, 01 (01), 45-55.
- Munandar. 2013. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE – YOGYAKARTA
- Prasetyo, Gege Edi. (2010), Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi Publisher
- Prasetyo, Wahyu Heri., & Agustina Prativi Nugraheni. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019.

JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 11(1), 1-10.

Rasdianto, Erlina. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI, Medan: Brama Ardian

Tita, Maulida. (2012). Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan).



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 9: PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Mertyani Sari Dewi, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja

BAB 9

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

B. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Riahi Balkoui. 2000. Teori Akuntansi Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- C. Rolin, Niswonger, dkk. 2005. Prinsip – Prinsip Akuntansi Edisi 19 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT. Indeks
- Halim, Abdul. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Harahap, Sofyan Safri. 2005. Teori Akuntansi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harmanto, M. 2002. Akuntansi Keuangan Menengah, Buku Satu. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2009. Pemeriksaan Akuntansi, Edisi Empat. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Nugroho, Widjajanto. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 10: PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak.

Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko

BAB 10

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa publik merupakan hal yang dilakukan pada instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengadaan barang merupakan kegiatan mengadakan benda yang memiliki wujud ataupun benda yang tidak memiliki wujud. Pengadaan jasa merupakan pengadaan pelayanan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa publik pada pemerintah Indonesia merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa terdapat 4 kategori atau jenis pengadaan (Gamas, 2021) yakni:

1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa konsultasi
4. Jasa lainnya

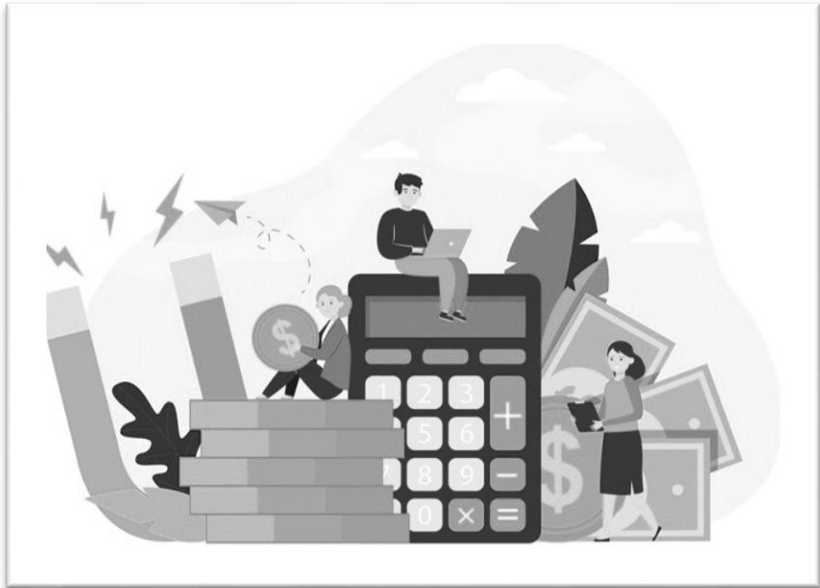
Pengadaan barang yang dimaksud tidak harus selalu dalam bentuk benda yang siap pakai yang tersedia di toko tetapi bentuknya lebih luas. Dapat berupa pengadaan lisensi software, website dan akun virtual, pengadaan Gedung yang tidak membangun dari nol, pengadaan alat transportasi darat, laut dan udara, ataupun pengadaan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan.

B. PEMBAHASAN MATERI

Pengadaan barang dan jasa publik adalah menurut Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal (1) angka (1) adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Diskominfo Kota Merto. (2020, 11 18). Retrieved from ekonsul.pbj.metrokota.go.id:
https://ekonsul.pbj.metrokota.go.id/knowledge_base/view/1
- Gamas, C. (2021, Januari 7). Retrieved from <http://christiangamas.net>:
<https://christiangamas.net/contoh-pengadaan-barang/>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. (2020). Retrieved from virtual-library.lkpp.go.id: <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/33/1/02.%20Buku%20Informasi%20A.%20Gambaran%20Umum%20PBJP.pdf>



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 11: TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENURUT ISAK 35

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak.

Sekolah Vokasi IPB

BAB 11

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENURUT ISAK 35

A. PENDAHULUAN

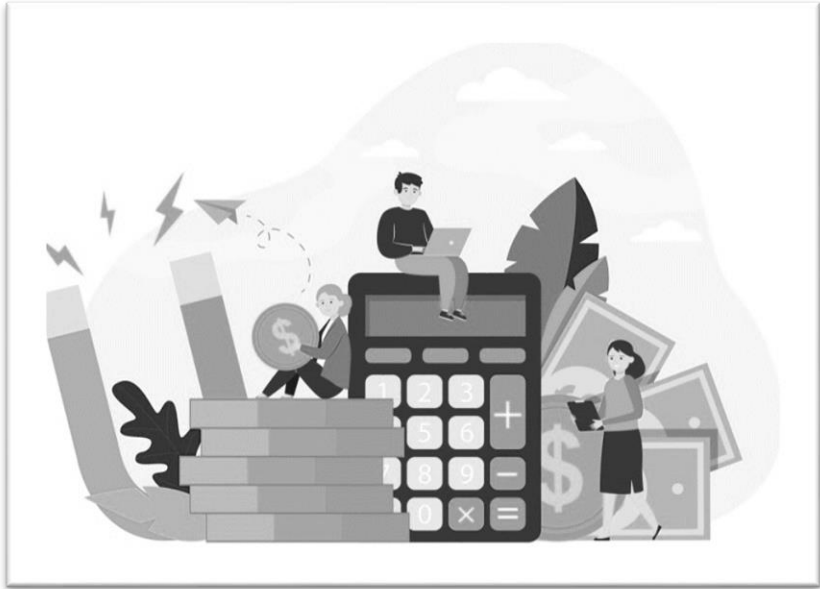
Definisi pengertian organisasi sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018).

Karakteristik organisasi sektor publik mempunyai perbedaan dengan organisasi komersial. Perbedaan utama organisasi sektor publik dengan sektor swasta adalah organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tidak mencari laba (entitas berorientasi non laba) sementara tujuan utama organisasi sektor swasta adalah mencari laba. Entitas berorientasi non laba (EBNL) memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (ISAK 35, 2019). Sumber daya EBNL berasal dari: a) sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. b) utang dan c) pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik.

Untuk menentukan organisasi termasuk entitas berorientasi laba atau non laba, menurut ISAK 35 organisasi dapat menilai dirinya sendiri dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini: (a) apakah sumber daya entitas berorientasi non laba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan; (b) menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi non laba tersebut; (c)

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. & Saat, S. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Edisi Pertama. Jakarta: Selemba Empat
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sabeni, Arifin dan Ghozali, I. (2008). Pokok- Pokok Akuntansi Pemerintah. BPF: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal/pdf_view2/RUhxRXBsd0QvMGYzT1JPeWJLMEo5QT09
- PSAK 2 Laporan Arus Kas https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal/pdf_view2/cVhVRjIXWmJNMDRudEo5S09nSytJUT09
- ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal/pdf_view2/Z1lhMm00MGMrOUpvOTJRd3ZxemxjQT09



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 12: PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Sri Adella Fitri, S.E, M.Si., QIA

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

BAB 12

PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Tuntutan tanggung jawab publik yang tinggi menyangkut informasi administrasi publik kepada masyarakat, yang juga mencakup informasi akuntansi yang berasal dari laporan keuangan. Sektor publik adalah organisasi yang kompleks dan beragam/heterogen, oleh karena itu kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen berbeda. Tidak hanya informasi keuangan, tetapi juga informasi non keuangan.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk kewajiban para pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, memerikan penyajian, melaporkan dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik yang semakin meningkat mempengaruhi pengelolaan informasi publik sektor publik, yang meliputi informasi pelaporan keuangan berupa laporan keuangan, namun pelaporan keuangan bukanlah tujuan akhir dari akuntabilitas publik.

Jadi apa yang dimaksud laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan sektor publik adalah penyajian kondisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh entitas publik. Laporan keuangan sektor publik ini merupakan bagian penting dari akuntabilitas sektor publik.

B. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

a. Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan merupakan informasi bisnis yang memuat informasi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang fakta.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). *“Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2021”*. Melalui <http://www.bpk.go.id>.
- Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, (2011), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
UU No.33/ 2004) tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 13: *VALUE FOR MONEY*

AUDIT

Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST.

Politeknik Negeri Jember

BAB 13

VALUE FOR MONEY AUDIT

A. PENDAHULUAN

Lembaga pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya. Setiap pertanggungjawaban perlu untuk dilakukan audit atau pemeriksaan. Agoes (2012) menyebutkan auditing adalah sebagai pemeriksaan terhadap laporan keuangan, catatan pembukuan serta bukti pendukung yang dilakukan dengan kritis dan sistematis oleh pihak independen. Tujuan dari dilakukannya audit adalah dengan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Audit yang dilakukan tidak hanya *conventional audit* (audit keuangan) akan tetapi juga wajib dilakukan *value for money audit*. Perbedaan mendasar pada kedua jenis audit tersebut yakni pada *conventional audit*, lingkup pemeriksaan berfokus pada keuangan dan kepatuhan. Berbeda dengan *value for money audit*, lingkup pemeriksaan meliputi audit keuangan, kepatuhan dan juga audit kinerja. Audit kinerja (*performance audit*) terdiri dari tiga hal yakni ekonomi, efisien dan efektivitas. Ketiga hal tersebut sering dikenal sebagai *value for money*. Untuk audit ekonomi dan efisien sering disebut sebagai *operational audit*. Istilah untuk audit efektivitas sering dikenal sebagai *program audit*. Karakteristik dari audit kinerja tersebut dapat disajikan pada gambar 1 berikut ini:

DAFTAR PUSATKA

Agoes, S. (2012). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi, F. (2016). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Pres.

Malan, R. M., Fountain, J. R., Arrowsmith, D., & Lockridge, R. (1984). Performance auditing in local government. *Government Finance Officers Association*, 9.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

PROFIL PENULIS

Ir. Hartoto, M.Si.



Penulis adalah Lektor bidang spesialisasi Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang. Pemerhati masalah kemiskinan, pelayanan publik, termasuk pembangunan ekonomi wilayah. Sejak lulus Sarjana Ekonomi Pertanian Universitas Lampung tahun 1990. Pada tahun 2003, mengambil program Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Mulawarman dan ditempuh sekitar 20 bulan. Banyak kursus maupun pelatihan yang pernah diikuti, seperti TOT Pendamping PKH, TOT Pendamping KUBE, TOT UMKM dan Koperasi, TOT Kader Bangsa, Pemberdayaan Masyarakat, pendidikan Anti Korupsi, Pegiat Anti Narkoba, dan lain sebagainya. Penulis sering terlibat dalam kegiatan jasa konsultasi pada banyak lembaga dan kementerian baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, maupun bantuan luar negeri. Jasa konsultasinya beragam dari pemberdayaan Koperasi UMKM, Pertanian/pedesaan, pelayanan publik, kredit perbankan, studi kelayakan, proyek implementasi yang meliputi hampir di seluruh Provinsi NKRI.

Itat Tatmimah, S.E, M.Si.



Penulis lahir di Cilegon 1974, adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta (1999) dan memperoleh gelar Magister Science program studi Akuntansi dari Universitas Jendral Soedirman (2012). Pernah mengajar di lembaga kursus Bahasa Inggris di Jakarta dan di Cirebon, sampai saat ini masih aktif dalam kegiatan kelembagaan kemasyarakatan serta aktif dalam kegiatan sosial lainnya.

Dr. Endraria, S.E., M.M., M.Akt., CRA., CRP.



Penulis lahir di Tangerang, 25 Juni 1982. Awal karir menjadi dosen tahun 2011 sampai dengan sekarang dimulai sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang hingga menjadi Dosen Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Memiliki Jabatan Fungsional Dosen Lektor 300 di bidang Ilmu Akuntansi, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Auditing. Sekarang menduduki jabatan sebagai Asisten Direktur 2 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pendidikan formal: S1 Bidang Akuntansi tahun 2005, dengan gelar Sarjana Ekonomi di STIE Muhammadiyah Tangerang, S2 Magister Manajemen tahun 2012 di Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan gelar MM. S2 Magister Akuntansi tahun 2014 di Universitas Budi Luhur Jakarta dengan gelar M.Akt, S3 Doktor Ilmu Akuntansi tahun 2017 di Universitas Padjadjaran Bandung dengan gelar Dr. Artikel yang telah ditulis antara lain:

- 1) Artikel Penelitian pada jurnal Internasional Berindeks dengan judul *Influence Perception Accounting Students Against Ethics Preparation of Financial Reporting (Empirical Study on Accounting Students of the Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Tangerang 2013)*. *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.6, Maret 2015.
- 2) Artikel Penelitian pada jurnal Internasional Berindeks dengan judul *Effect of Accounting Lecturer Lecturer Commitment To The Development Of Professional Accounting (Empirical Study Lecturer Accounting Faculty Of Economics, University Of Muhammadiyah Tangerang 2013)*. *International Journal of Scientific & Technology Research* Volume 4, Issue 04, April 2015.
- 3) Artikel Penelitian pada jurnal Internasional Berindeks dengan judul *Strategic Management Accounting "What happened to you"* *European Journal of Business and Management* ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.7, No.12, Mei 2015
- 4) Artikel Penelitian pada jurnal Internasional Berindeks dengan judul *Effect Of Perception Use Of Information Technology, Safety, And*

Perception Of Interest Trust Online Trading System Using Internet Banking (Study Empris In BRI Bank Branch Office Tangerang 2014). International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 06, June 2015.

- 5) Artikel Penelitian pada jurnal Internasional Berindeks dengan judul *Influence of Accounting Students against Spiritual Intelligence Level Understanding of Accounting (Accounting Student Case Study at Muhammadiyah University of Tangerang). Journal of Economics and Sustainable Development ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.6, No.9, Juni 2015.*
- 6) Artikel Penelitian pada jurnal Internasional Berindeks dengan judul *Users Competence and Influence On The Quality Of Accounting Information System. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 10th April 2016. Vol.86. No.1.*

Muzayyanah, M.Pd.



Penulis lahir di Cirebon dan lulus Sarjana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi Unswagati Cirebon pada tahun 2012. Lulus Magister Jurusan Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2016. Penulis adalah dosen tetap sejak tahun (2018) hingga sekarang pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, Metode Kuantitatif Pengambilan Keputusan, Manajemen Koperasi dan UKM, Kewirausahaan, Kewirausahaan Islam dan *E-Business*. Penulis pernah menulis buku tentang Ekonomi Syariah dan pernah bekerja sebagai Dosen di Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di STAIMA Cirebon tahun (2017)

Sriyani, S.E., M.Akt.



Penulis lahir di Yogyakarta, 8 Maret 1977, menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1998, menyelesaikan Strata 1 pada Jurusan Akuntansi lulus pada tahun 2003, dan menyelesaikan pendidikan Strata 2 pada Jurusan Akuntansi pada tahun 2010. Mengajar di STAN sejak tahun 2000 mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Biaya dan Akuntansi Pemerintah. Mengambil Jabatan Fungsional Dosen dan bergabung pada Politeknik Keuangan Negara STAN pada bulan November 2016 dan mengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat/Daerah, Penatausahaan Bendahara, Akuntansi Biaya dan Pengantar Akuntansi. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Diploma 1 Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN dan aktif menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi termasuk membimbing KTTA dan skripsi mahasiswa. Penelitian/Publikasi yang pernah dilakukan antara lain Penelitian/Publikasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa; Studi Kasus atas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Garut, dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa.

Dr. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA., CRA., CTT., CPTT.



Penulis adalah Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura dan menjadi Konsultan dan Tenaga Ahli Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Keuangan Desa. Tenaga Ahli Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2002 – 2013. Meraih gelar sarjana dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang pada tahun 1994 dan gelar magisternya dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2004, serta Gelar Doktor dari Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Penulis pernah menjadi Ketua Satuan Pengawas Internal dan Ketua LPPM di Universitas Trunojoyo Madura, serta saat ini juga aktif sebagai Pengurus Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP), anggota Persatuan

Auditor Internal Indonesia (PAII) dan ISEI Madura. Email: mdjasuli@gmail.com.

Iroh Rahmawati, S.E., M.Ak.



Penulis lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FE UNTIRTA) pada tahun 2008, lulus S2 di Program Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2017. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sutomo. Mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Keuangan Lanjutan Akuntansi. Pengalaman mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten mengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, dan Akademi Keuangan Perbankan Indonesia, mengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Universitas Banten Jaya mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan Akuntansi Syariah. Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK Al-Had Nusantara Kota Serang Provinsi Banten tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Heni Dwi Lestari, S.Pd., M.Par.



Penulis lahir di Klaten pada tanggal 27 November 1995. Saat ini penulis adalah staff pengajar pada Program Studi D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta sejak tahun 2019. Pendidikan yang telah ditempuh penulis antara lain S1 Sarjana Pendidikan lulus pada tahun 2017 dari Fakultas Ekonomi pada Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Magister Pariwisata lulus pada tahun 2019 dari Program Studi Pariwisata pada Jurusan Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta.

Mertyani Sari Dewi, S.E., M.Si.



Penulis lahir di Singaraja, pada tanggal 4 Maret 1993, putri keempat dari I Ketut Suanjaya, S.Pd dan Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum. Ketertarikan akan dunia Ekonomi sudah muncul mulai bangku SMA dimana setelah lulus memilih masuk jurusan Akuntansi dan menyelesaikannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan kuliah Pascasarjana Magister Sains Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Udayana pada tahun 2018. Saat ini menjadi Dosen Tetap Yayasan Ratyni Gorda di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Aktif menulis di beberapa jurnal yaitu *International Journal of Social Science and Business*, Jurnal Artha Satya Dharama, Jurnal Widya Satya Dharma, Jurnal Akuntansi Kompetitif dan *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di danai oleh internal Perguruan Tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak.



Penulis bernama Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak. Lahir di Desa Sumber Agung pada tanggal 30 September 1990. Putri dari Bapak Agus Muhadi, S.Pd. dan Ibu Carti. Tinggal di Bangko Tinggi, Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Penulis merupakan Istri dari Bapak Arief Musvidi, S.P., memiliki anak bernama Vinia Asyia Humaira dan Jihan Azalia Arief. Menyelesaikan kuliah Strata-1 jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan Strata-2 Jurusan Ilmu Akuntansi di Universitas Jambi Konsentrasi Akuntansi Keuangan. Mengajar di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 2016 hingga saat ini. Bergabung dalam Asosiasi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah se-Indonesia. Aktif menulis buku dan meneliti dan telah menulis beberapa buku dan

jurnal tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah. Email aktif penulis kurniasihpenulis2022@gmail.com.

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak.



Penulis merupakan lulusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Pada tahun 2005, penulis menyelesaikan studi S2 di Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Penulis adalah staf pengajar di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV IPB). Selama ini penulis mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Pajak Perpajakan 1 dan Perpajakan 2 serta Pajak Internasional. Selain menjadi pengajar, penulis pernah bekerja di Direktorat Keuangan dan Akuntansi IPB. Saat ini penulis juga menjadi ketua Tax Center Sekolah Vokasi IPB.

Sri Adella Fitri, S.E, M.Si., QIA.



Penulis merupakan tenaga pendidik pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sejak Tahun 2006. Penulis memiliki keilmuan di bidang Akuntansi, melalui pendidikan formal S1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Andalas dan S2 pada Program Pascasarjana, program studi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Andalas. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan Internal Audit melalui Program Sertifikasi QIA (*Qualified Internal Audit*). Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang ilmu tersebut, dan melakukan berbagai pengabdian di bidang ilmu akuntansi. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan di danai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Agama. Selain meneliti dan melakukan pengabdian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi Bangsa dan Negara yang sangat tercinta ini. Buku yang pernah penulis hasilkan diantaranya Pengantar

Akuntansi 1 (2013), Modul Praktikum Akuntansi Biaya (2016). Pengantar Akuntansi "Integrasi Akuntansi Syariah dan Riset Akuntansi" (2022), Akuntansi Perbankan Syari'ah (2022), Auditing Syariah (2023).

Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST.



Penulis adalah staf pengajar jurusan Bisnis Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Jember, Sarjana Sains pada Universitas Jember dan Magister Sain Terapan di Politeknik Negeri Jember. Selama menjadi staf pengajar beliau aktif dalam penelitian di bidang Akuntansi dan Agribisnis. Hasil penelitiannya pernah dipresentasikan pada seminar Internasional, seperti *The 1st International Conference on Food and Agriculture (ICOFA)* tahun 2018, *The 2nd ICOFA* pada tahun 2019, *The 3rd ICOFA* tahun 2020, *The 1st International Conference on Social Science, Humanities and Public Health (ICOSHIP)* pada tahun 2020, dan *The 2nd ICOSHIP* pada tahun 2021, *The 3rd ICOSHIP* pada tahun 2022. Selain buku ini, penulis juga menulis buku *Perencanaan dan Penganggaran Desa (Studi Kasus Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember)* pada tahun 2021, *Buku Statistik Deskriptif* pada Tahun 2022, *book chapter Kesehatan, Lingusitik dan Sosial Terapan* pada tahun 2022, dan *Buku Hukum Pajak* pada tahun 2023.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Di era globalisasi, peran akuntansi sektor publik di Indonesia di nilai sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dalam proses perkembangannya akuntansi sektor publik mengalami perubahan. Karena sebelum adanya reformasi dan transparansi akuntansi sektor publik dianggap sebagai tempat kebocoran dana, akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta). Setelah era reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya "*good public and corporate governance*", karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi entitas yang dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan publik. Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik non profit motif, dimiliki secara kolektif, dan pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan tidak harus menerima imbalan langsung. Sedangkan akuntansi sektor bisnis memiliki karakteristik profit motif, dimiliki secara perorangan atau badan, dan pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan menerima imbalan langsung baik barang maupun jasa.